

Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan

Jarot Kurniawan^{*)}

Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan

ABSTRAK

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam proses perbaikan taraf hidup. Hal tersebut diyakini oleh sebagian besar orang tua. Tidak sedikit dari mereka yang bersusah payah membanting tulang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pasal 31 UUD 1945 dengan tegas mengatur pentingnya pendidikan bagi warga negara Republik Indonesia. Pemerintah pun punya kewajiban untuk menyediakan anggaran pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Pengorbanan yang besar dari orang tua maupun pemerintah yang telah menyediakan biaya untuk pendidikan apakah sebanding dengan yang diharapkan. Berdasarkan penelitian menggunakan uji beda dua rata rata dengan sumber data Susenas tahun 2013 diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Grobogan tingkat pendidikan mempunyai hubungan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu variabel yang mempunyai kaitan dengan tingkat pendapatan dan berkaitan erat pula dengan tingkat status sosial seseorang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan akademisi.

Kata kunci: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, hubungan

Education and Income Dilemma in Grobogan Regency

ABSTRACT

Education is very important aspect in living standard improvement process. That's believed by most of parents. Most of them have a great effort and struggle to provide a good education for their children. Article 31 UUD 1945 regulated the importance of education for the citizens of the Republic of Indonesia firmly. The government also has an obligation to provide education budget for the Indonesian people. The question is great sacrifice of parents and governments that provide funding for education is comparable to that expected. Based on research using two different test average with Susenas data source in 2013 showed that in Grobogan Regency, level of education have a relationship with income levels. Education is one of the variables that have relation with income level and social status level in society. This is relevant with previous studies that have been conducted by researchers and academics.

Keywords: education level, income level, relationship

PENDAHULUAN

Sering kita mendengar orang tua menasehati anaknya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin dengan harapan modal pendidikan tersebut akan mengantarkan anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik dan tentunya penghasilan yang tinggi pula. Tidak sedikit orang tua rela mengeluarkan uang lebih dengan menyekolahkan anaknya ke luar negeri dengan anggapan pendidikan di luar negeri kualitasnya lebih baik daripada pendidikan di dalam negeri.

Kondisi di atas menggambarkan besarnya harapan

orang tua terhadap peran pendidikan dalam proses perbaikan tingkat pendapatan (mobilitas sosial vertikal). Kebanyakan orang tua yakin bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi proses tersebut. Makin baik kualitas pendidikan, maka makin besar pula harapan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Pemerintah pun menaruh perhatian serius terhadap dunia pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas telah mengatur pentingnya pendidikan bagi warga negara Republik Indonesia. UUD 1945 Pasal 31 a berbunyi: "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran*" sedangkan Pasal 31 b berbunyi: "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional*".

^{*)} E-mail: jarot.bps@gmail.com

Dalam alokasi anggaran pendidikan pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mendekati angka ideal 20 persen dari total anggaran.

Semakin besarnya anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah diharapkan bisa memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan bisa memperbaiki kualitas ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Grobogan. Pertanyaannya apakah pendidikan mempunyai kontribusi nyata terhadap tingkat pendapatan masyarakat?

Penelitian ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan tentang keterkaitan antara pendidikan dengan tingkat pendapatan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Grobogan. Hasil tulisan ini bisa dijadikan rujukan bagi *stake holder*, yaitu para pengambil kebijakan kaitannya dengan pengembangan dunia pendidikan baik di Kabupaten Grobogan maupun di luar Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan dipilih sebagai obyek penelitian dikarenakan memiliki luas wilayah terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kabupaten Cilacap. Angka kemiskinannya pun masih relatif tinggi di angka 14,87 persen atau pada urutan ke-14 terbanyak (kondisi tahun 2013). Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tingkat pendapatan masyarakat yang berpendidikan SMP sederajat kebawah (kelompok I) sama dengan tingkat pendapatan masyarakat yang berpendidikan SMA sederajat ke atas (kelompok II).

H1 : Tingkat pendapatan masyarakat yang berpendidikan SMP sederajat kebawah (kelompok I) berbeda dengan tingkat pendapatan masyarakat yang berpendidikan SMA sederajat ke atas (kelompok II).

Tinjauan tentang Pendidikan

Pendidikan mempunyai definisi yang bervariasi, tetapi pada hakekatnya mempunyai arti yang sama. Menurut Ramayulis dkk. (2009) istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*paedagogie*" yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan "*education*" yang berarti pengembangan dan bimbingan.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 13 Ayat 1 jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (UU No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8). Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi atau pun memasuki lapangan kerja.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Guna mempermudah analisis non parametrik dalam tulisan ini, maka tingkat pendidikan masyarakat menurut jenjang diklasifikasikan menjadi dua. Pertama yaitu masyarakat yang tidak berpendidikan dan berpendidikan SMP sederajat ke bawah (kelompok I) dan kedua adalah masyarakat yang berpendidikan SMA sederajat ke atas (kelompok II). Penelitian ini memasukan pendidikan non formal (pendidikan kejar paket) setara dengan pendidikan formal dikarenakan pada tahun 2013 ada kebijakan pemerintah bahwa siswa yang tidak lulus ujian nasional bisa mengikuti ujian susulan lewat jalur pendidikan kejar paket.

Asumsinya perlakuan tersebut diharapkan bisa

mengcover siswa yg tidak lulus pada sekolah formal tetapi lulus pada jalur non formal. Konsep dari tingkat pendidikan dalam tulisan ini adalah berdasarkan kepemilikan ijazah yang dimiliki, sehingga orang yang dalam ujian susulan kejar paket lulus, tetapi pada jalur formalnya tidak lulus tetap tercakup dalam penelitian ini.

Tinjauan tentang Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional. Menurut Reksoprayitno (2009), pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.

Menurut Sunuharjo (2009), pendapatan dikategorikan menjadi tiga antara lain: (i) Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima bisaanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi; (ii) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan bisaa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa; (iii) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan bisaanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Pada penelitian ini, sesuai konsep Susenas tahun 2013, jenis pendapatan yang dipakai adalah jenis pendapatan poin satu dan dua, yaitu pendapatan dalam bentuk uang dan barang.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sudah banyak dilakukan. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Tarigan (2006), akademisi di Universitas Sumatera Utara (USU). Dalam penelitiannya, Tarigan menggunakan model penelitian kepustakaan (*literatur research*). Penelitiannya tersebut membandingkan empat tesis mahasiswa pasca sarjana yang membahas secara langsung atau tidak langsung tentang keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa dari keempat tesis terjadi dua kesimpulan yang berbeda. Pertama menyatakan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan, sementara yang kedua menyatakan pendidikan tidak mempunyai pengaruh

terhadap tingkat pendapatan.

Kondisi pertama terjadi pada tesis yang menganalisis keterkaitan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan untuk berbagai macam lapangan pekerjaan, sementara penelitian kedua khusus untuk satu macam lapangan usaha yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Contoh untuk kondisi yang kedua adalah pekerjaan nelayan dan pedagang kaki lima. Tulisan Tarigan ini bisa dijadikan rujukan awal dalam melakukan penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap tingkat pendapatan suatu masyarakat di daerah lain, tidak terkecuali di Kabupaten Grobogan.

Penelitian lainnya yang membahas tentang hubungan antara pendidikan dengan tingkat pendapatan pernah dilakukan oleh Juwita dan Retno Budi Lestari (2013). Dalam penelitiannya yang berjudul *Kontribusi Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Sektoral Di Kota Palembang*, menggunakan metode analisis regresi berganda dengan variabel dependen pendapatan tenaga kerja, dan beberapa variabel independen yaitu tingkat pendidikan, umur, jam kerja dan jenis kelamin.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel pendidikan, umur, jam kerja dan jenis kelamin secara konstanta mempunyai angka signifikan dibawah 0,05. Variabel independen tersebut berpengaruh terhadap pendapatan tenaga kerja. Jenis kelamin dan jam kerja memiliki konstanta negatif. Jenis kelamin berkonstanta negatif karena perusahaan memberikan besar kecilnya pendapatan tenaga kerja selalu berdasarkan tingkat pendidikan dan tidak berdasarkan gender. Jam kerja juga memiliki konstanta negatif dikarenakan tenaga kerja pada titik tertentu (titik jenuh) akan lebih memilih istirahat daripada menambah jam kerja.

Selain dua penelitian di atas, penelitian yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan pernah dilakukan juga oleh Clark (1944) dalam bukunya yang berjudul *An Investment in People*. Dikutip dari situs www.uns.ac.id Clark menyatakan bahwa, "*experiments in low-income communities show clearly that education can be used to help people obtain a higher standard of living through their own efforts*". Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat dipergunakan untuk membantu penduduk dalam meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang lebih tinggi melalui usaha mereka sendiri. Penegasan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Salah satu hasil penelitiannya menyebutkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilannya (tamatan sekolah

dasar maksimal antara empat s.d. lima ribu dolar setahun; tingkat sekolah menengah atas maksimal antara lima s.d. enam ribu dolar setahun dan tingkat perguruan tinggi maksimal antara delapan s.d. sembilan ribu dolar setahun. Walau demikian tentulah dimaklumi bahwa tidak semua orang mengalami atau memiliki korelasi antara tingkat pendidikan dan penghasilan seperti penjelasan diatas, penyimpangan tentu ada sebagaimana dalam masalah sosial lainnya.

DATA DAN METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan sumber data primer (*raw data*) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 (Susenas 2013). Data ini dipilih karena data yang tersedia di BPS Kabupaten Grobogan yang terakhir adalah tahun 2013. Jumlah sampel Susenas 2013 di Kabupaten Grobogan sebanyak 96 blok sensus yang terbagi menjadi empat triwulan. Masing-masing sampel untuk tiap triwulan sebanyak 24 blok sensus dan tiap-tiap blok sensus terdiri dari 10 rumah tangga sampel.

Hasil susenas didesain untuk estimasi sampai tingkat kabupaten/kota, meskipun sampelnya hanya 960 rumahtangga untuk Kabupaten Grobogan, namun jumlah sampel tersebut dianggap sudah mewakili populasi penduduk yang ada di Kabupaten Grobogan. Variabel yang diambil dari hasil susenas 2013 terdiri dari variable tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Data tersebut diambil dari keterangan individu anggota rumah tangga sampel.

Selain *raw data* Susenas, untuk menunjang analisis penulisan juga menggunakan data perhitungan PDRB, indikator pendidikan dan data kemiskinan di Kabupaten Grobogan. Data ini dipakai untuk menganalisis secara makro kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Grobogan.

Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mendukung analisis non parametrik yang digunakan dalam tulisan ini. Melihat gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Grobogan dilihat dari sudut pandang tingkat pendidikan dan tingkat pendapatannya. Tabulasi silang merupakan instrumen yang dipakai dalam analisis deskriptif ini.

Uji Mann-Whitney

Uji *Mann-Whitney* biasa disebut dengan *U test*. Uji *Mann-Whitney* termasuk dalam kategori metode statistik non parametrik (Santoso, 2001). Metode ini untuk mengetahui perbedaan median atau pun

mean 2 kelompok bebas apabila skala data variabel adalah ordinal atau interval. Dalam hal penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan (ordinal) dengan tingkat pendapatan (rasio). Kelebihan metode non parametrik adalah tanpa mensyaratkan asumsi-asumsi seperti pada metode parametrik.

Prosedur pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel
- 2) Mengurutkan nilai pengamatan mulai nilai terkecil dalam sampel gabungan
- 3) Memberikan rangking untuk tiap-tiap nilai mulai rangking 1 sampai rangking yang terbesar
- 4) Memberi nilai jenjang menurut nilai sampel gabungan
- 5) Memisahkan kedua kelompok pengamatan yang sebelumnya digabung kemudian dijumlahkan nilai jenjangnya.
- 6) Menghitung nilai *U* dengan rumus sebagai berikut:

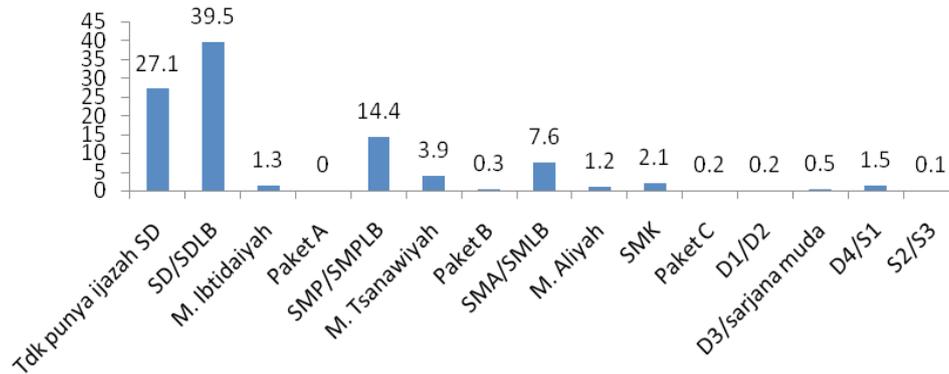
$$U_1 = n_1 n_2 \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$U_2 = n_1 n_2 \frac{n_2(n_2+1)}{2} - R_2 \dots\dots\dots (2)$$

Dimana: n_1 = Jumlah sampel kelompok I, n_2 = Jumlah sampel kelompok II, R_1 = Jumlah jenjang pada kelompok I, dan R_2 = Jumlah jenjang pada kelompok II

- 7) Nilai U_1 dan U_2 dipilih nilai yang terkecil untuk dibandingkan dengan nilai *U* tabel.
- 8) Keputusan untuk menerima atau menolak H_0 tergantung dari perbandingan nilai *U* tabel. Apabila nilai *U* hitung lebih besar dari nilai *U* tabel maka H_0 diterima. Sebaliknya H_0 akan ditolak jika nilai *U* hitung lebih kecil dari nilai *U* tabel. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka penentuan menerima atau menolak H_0 bisa dilakukan melalui program *SPSS* dengan melihat nilai *asymptotic significance*. Pada tingkat kepercayaan 95% Keputusan menerima H_0 apabila nilai signifikansi > 0,05. Sementara keputusan menolak H_0 apabila nilai signifikansi < 0,05 (Santoso,2001).
- 9) Uji *Mann-Whitney* menggunakan hipotesis sebagai berikut:
 H_0 :Kedua populasi/sampel adalah identik
 H_1 :Kedua populasi/sampel adalah tidak identik

Gambar 1. Persentase Jumlah Penduduk di Kabupaten Grobogan berdasarkan Ijazah Terakhir yang dimiliki



Sumber: Susenas 2013, diolah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran tentang Pendidikan di Kabupaten Grobogan

Hasil Susenas 2013 di Kabupaten Grobogan memperlihatkan bahwa 39,5 persen penduduk di Kabupaten Grobogan hanya menyelesaikan pendidikannya sampai level SD. Nilai ini tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Angka tersebut memberi indikasi awal bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Grobogan relatif masih rendah, bahkan jumlah penduduk yang belum pernah mengikuti sekolah sampai tamat SD jumlahnya masih sangat tinggi, mencapai angka 27,1 persen.

Kecenderungan tingkat pendidikan SMP dan SMA mengecil bila dibandingkan dengan tingkat SD. Trend ini wajar mengingat tidak semua lulusan SD melanjutkan ke SMP, begitu pula tidak semua lulusan SMP melanjutkan pendidikan ke SMA. Penduduk bukan usia sekolah yang tidak mempunyai ijazah mayoritas adalah penduduk berusia di atas 50 tahun dan sebagian besar tinggal di perdesaan.

Tingkat partisipasi sekolah sebenarnya juga bisa dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS). APS umur 7 s.d. 12 tahun di Kabupaten Grobogan tahun 2013 sebesar 98,87 persen, APS 13 s.d. 15 tahun sebesar 93,25 persen, APS 16 s.d. 18 tahun sebesar 52,04 persen dan APS 19 s.d. 24 tahun sebesar 17,66 persen. Angka tersebut selaras dengan angka yang ada pada Gambar 1 yang memperlihatkan angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi nilainya semakin mengecil. Makin besar nilai APS makin besar pula tingkat partisipasi sekolah masyarakat.

Menurut Todaro (1995), pada negara-negara

berkembang termasuk Indonesia tingkat melek huruf (konsep kebalikan dari tingkat buta huruf) rata-rata hanya mencapai 45 persen dari jumlah penduduk, itu artinya tingkat buta hurufnya masih berkisar 55 persen. Sementara negara-negara Dunia Ketiga lainnya yang relatif sudah berkembang, tingkat melek hurufnya 64 persen. Sedangkan angka untuk negara-negara maju telah mencapai 99 persen. Kondisi angka melek huruf di Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 menurut data BPS sebesar 91,78 persen, ini artinya program pemberantasan buta aksara yang dilakukan Pemda Kabupaten Grobogan sudah mulai mendapatkan hasil yang positif.

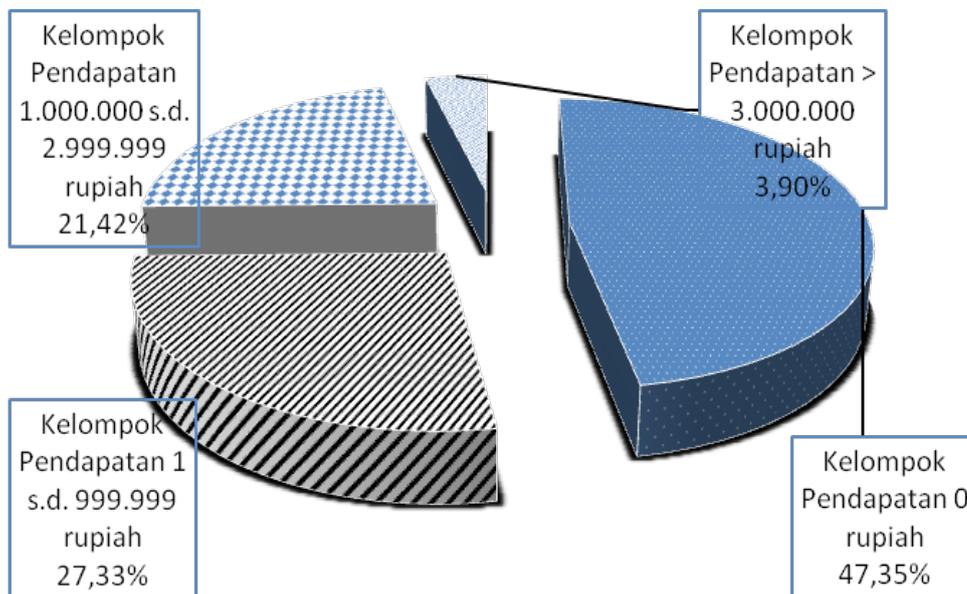
Gambaran tentang Pendapatan di Kabupaten Grobogan

Kelompok distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan tahun 2013 berdasarkan hasil Susenas bisa dilihat seperti pada gambar 2. Pada gambar tersebut terlihat ada empat kelompok masyarakat di Kabupaten Grobogan berdasarkan pendapatan yang diterima. Kelompok pertama adalah masyarakat yang mempunyai pendapatan nol rupiah, yaitu sebanyak 47,35 persen.

Kondisi tersebut berarti sebagian besar masyarakat di Kabupaten Grobogan usia 10 tahun ke atas yang bekerja berstatus sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Pada konsep Susenas orang yang bekerja sebagai pekerja keluarga dianggap sebagai orang yang bekerja asalkan dilakukan selama 1 jam berturut-turut selama seminggu yang lalu, dan dalam rangka memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan rumah tangga.

Kelompok masyarakat yang kedua memperoleh penghasilan antara 1 rupiah sampai 999.999 rupiah yaitu sebanyak 27,33 persen. Kelompok ini umumnya

Gambar 2. Kelompok Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Grobogan Usia 10 Tahun ke Atas yang Berstatus Bekerja pada Tahun 2013



Sumber: Susenas 2013, data diolah

adalah para pekerja bebas di sektor pertanian. Dari seluruh masyarakat yang berpenghasilan pada kelompok kedua ini 41,2 persen berasal dari sub sektor tanaman padi dan palawija. Sementara kalau dilihat pada sektor pertanian keseluruhan sebanyak 46,6 persen.

Kelompok ketiga adalah masyarakat dengan penghasilan 1 juta rupiah sampai 2.999.999 rupiah. Ada sebanyak 21,42 persen masyarakat Kabupaten Grobogan yang berada pada kelompok pendapatan ini. Penyumbang terbesar pada kelompok pendapatan ketiga ini berasal dari sektor konstruksi dan bangunan yaitu sebanyak 36,6 persen.

Kelompok terakhir adalah kelompok keempat yaitu masyarakat dengan penghasilan di atas tiga juta rupiah. Masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan ini hanya sekitar 3,9 persen dari total masyarakat di Kabupaten Grobogan usia 10 tahun ke atas yang berstatus bekerja. Lapangan usaha yang paling besar menyumbang pada kelompok keempat ini adalah sektor jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan yaitu sebesar 28,1 persen.

Berdasarkan teori yang disampaikan Todaro (1995), salah satu ciri negara sedang berkembang adalah Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor pertanian. Kondisi di Kabupaten Grobogan sektor pertanian berkontribusi terhadap PDRB sebesar 41,16 persen. Hal tersebut berarti sektor pertanian di Kabupaten Grobogan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap

pendapatan masyarakat yang merupakan ciri dari sebuah negara berkembang.

Tabulasi Silang Variabel Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan

Sebagai gambaran awal, sebelum melakukan analisis menggunakan uji *Mann-Whitney* bisa dilakukan analisis sederhana dengan melakukan tabulasi silang terhadap kedua variabel yang menjadi indikator tersebut. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilakukan analisis antara variabel tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan tingkat pendapatan yang diterima. Analisis pada Tabel 1 dibaca ke samping. Dari keseluruhan masyarakat yang tidak pernah sekolah/tidak tamat SD kelihatan jelas sebagian besar (58,6%) tidak berpendapatan. Tiga puluh persen berpendapatan di bawah 1 juta rupiah; sekitar 10,6 persen berpenghasilan antara 1 .d. 3 juta rupiah; dan sisanya 0,8 persen berpenghasilan di atas 3 juta rupiah.

Data Tabel 1. menjelaskan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan tidak pernah sekolah, tamat SD sederajat, tamat SMP sederajat, tamat SMA sederajat semakin besar jumlah pendapatannya semakin kecil jumlah populasinya. Hal sebaliknya terjadi untuk masyarakat yang berijazah D4/S1. Pada masyarakat golongan ini semakin besar tingkat pendapatan semakin besar jumlah populasinya. Sementara untuk lulusan D1/D2, DIII dan S2/S3 belum jelas polanya.

Tabel 1. Persentase Kepemilikan Ijazah Penduduk 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Grobogan menurut Tingkat Pendapatan Kondisi Tahun 2013 (dalam rupiah)

Uraian	Kelompok Pendapatan			
	0	1 s.d. 999.999	1.000.000 s.d. 2.999.999	> 3.000.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tdk punya ijazah SD	58,6	30,0	10,6	0,8
SD/SDLB	48,4	25,1	24,3	2,2
M. Ibtidaiyah	50,5	20,1	29,4	0,0
Paket A	100,0	0,0	0,0	0,0
SMP/SMPLB	35,5	31,5	30,9	2,1
M. Tsanawiyah	65,2	12,5	19,9	2,5
Paket B	19,8	47,6	32,6	0,0
SMA/SMLB	31,0	26,5	33,2	9,3
M. Aliyah	39,9	32,0	24,5	3,5
SMK	30,1	31,5	24,5	13,8
Paket C	0,0	100,0	0,0	0,0
D1/D2	0,0	71,4	0,0	28,6
D3/sarjana muda	24,1	17,7	47,7	10,4
D4/S1	6,3	29,5	34,1	30,1
S2/S3	35,5	41,4	0,0	23,1

Sumber : Susenas 2013, data diolah

Tabel 2. Persentase Distribusi Pendapatan Penduduk di Kabupaten Grobogan menurut Ijazah yang dimiliki Kondisi Tahun 2013 (dalam rupiah)

Uraian	Kelompok Pendapatan			
	0	1 s.d. 999.999	1.000.000 s.d. 2.999.999	> 3.000.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tdk punya ijazah SD	21,4	18,4	7,4	3,5
SD/SDLB	50,0	43,5	47,8	27,9
M. Ibtidaiyah	2,0	1,4	2,3	0,0
Paket A	0,1	0,0	0,0	0,0
SMP/SMPLB	10,7	15,9	17,8	7,8
M. Tsanawiyah	5,8	1,9	3,4	2,7
Paket B	0,2	0,7	0,6	0,0
SMA/SMLB	5,5	7,9	11,3	20,7
M. Aliyah	1,6	2,1	1,9	1,8
SMK	1,9	3,3	2,9	10,7
Paket C	0,0	1,0	0,0	0,0
D1/D2	0,0	0,7	0,0	2,0
D3/sarjana muda	0,3	0,4	1,3	1,9
D4/S1	0,3	2,6	3,4	19,8
S2/S3	0,1	0,3	0,0	1,1

Sumber : Susenas 2013, data diolah

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat dilakukan analisis bahwa dari seluruh masyarakat yang tidak berpenghasilan 90,2 persen adalah masyarakat yang tidak berpendidikan dan berpendidikan SMP sederajat kebawah. Selanjutnya dari seluruh masyarakat yang berpenghasilan sampai dengan 999.999 rupiah 81,8 persennya adalah masyarakat yang tidak berpendidikan dan berpendidikan SMP

sederajat ke bawah.

Pada kelompok masyarakat dengan pendapatan 1.000.000 rupiah s.d. 2.999.999 rupiah, 79,3 persen adalah masyarakat yang tidak berpendidikan dan berpendidikan SMP sederajat kebawah. Kelompok terakhir adalah masyarakat dengan tingkat penghasilan diatas 3.000.000 rupiah. Pada kelompok terakhir ini hanya 42 persen yang tidak berpendidikan

Tabel 3. Hasil Uji *Mann-Whitney*

Uraian	pendapatan bersih pekerjaan utama dalam sebulan
Mann-Whitney U	108468.500
Wilcoxon W	934723.500
Z	-8.476
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

Sumber: Susenas 2013, diolah

dan berpendidikan SMP sederajat kebawah atau dengan kata lain masyarakat berpenghasilan 3 juta rupiah ke atas didominasi oleh masyarakat berpendidikan SMA sederajat keatas.

Uji *Mann-Whitney* Hubungan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan

Hasil *Uji Mann-Whitney* diperoleh nilai n sebanyak 1.534. Nilai tersebut adalah total dari seluruh sampel anggota rumah tangga yang memiliki penghasilan. Sebagian besar sampel merupakan anggota rumah tangga yang tidak berpendidikan dan berpendidikan SMP sederajat kebawah (kelompok I), yaitu sebanyak 1.285 sampel. Sementara sisanya 249 sampel adalah anggota rumah tangga dengan pendidikan SMA sederajat keatas (kelompok II).

Berdasarkan hasil hitungan SPSS seperti pada tabel 3 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00. Kondisi ini menurut Santoso (2001) memiliki arti bahwa H_0 ditolak, atau dengan kata lain bahwa kedua populasi dari sampel tidak identik (nilai $probabilitas < 0,05$). Maksud dari kedua populasi sampel tidak identik sesuai dengan hipotesis penelitian adalah terjadi perbedaan yang berarti antara penghasilan masyarakat pada kelompok I dengan masyarakat pada kelompok II. Kondisi tersebut sejalan dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Menurut Todaro (1995), dalam bukunya *Pembangunan Ekonomi pada Negara Dunia Ketiga* dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi (pendapatan) suatu daerah/negara adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin baik mutu SDM nya, semakin baik pula tingkat pertumbuhannya, sementara mutu SDM sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Mutu SDM dilihat dari banyak aspek meliputi jumlah, tingkat keahlian, pandangan hidup, tingkat kebudayaan, sikap atau penilaian terhadap pekerjaan, serta akses secara kreatif dan otonom terhadap pekerjaan. Maksud dari peningkatan mutu SDM itu sendiri adalah untuk meningkatkan output. Peningkatan output akan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terdistribusi

merata apabila kualitas SDM nya juga merata.

Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh *Backer* (1993) juga menjelaskan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Pendapatan meningkat seiring dengan meningkatnya umur, dimana peningkatan tersebut juga berbanding lurus dengan tingkat keahlian individu tersebut. Hal ini yang menyebabkan teori *Human Capital* percaya bahwa investasi dalam pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Masyarakat menyadari bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin banyak ijazah yang dimiliki seseorang, maka akan semakin baik pula kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah tingkat pendidikan mempunyai hubungan dengan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Grobogan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat penulis sarankan kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk memberikan akses pendidikan formal bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelompok kelas ekonomi tersebut merupakan golongan yang sangat rentan untuk tidak bisa mengakses pendidikan dengan alasan ketiadaan biaya.

REFERENSI

- Sunuharjo, Bambang Swasto. 2009. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial.
- Badan Pusat Statistik. *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2009 – 2013*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- _____. 2013. *PDRB Kabupaten Grobogan 2013*. Purwodadi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.
- _____. 2013. *Pedoman Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2013. Raw Data Susenas 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2013. *Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2013*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

- Becker, Gary S. 1993. *Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Third Edition, The University of Chicago Press.
- Clark. 1944. *An Investment In People*. www.uns.ac.id/data/sp9.pdf.
- Juwita, Ratna, dan Retno B.L. 2013. *Kontribusi Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Sektoral Di Kota Palembang*. Jurnal Ilmiah STIE MDP, Maret 2013, Volume 2, No 2.
- Ramayulis dkk. 2009. *Dasar-dasar pendidikan*. Padang: The zaki Press.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang No. 20 tahun 2003*. Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2001. *SPSS Versi 10*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Reksoprayitno, Soediyono. 2009. *Ekonomi Makro*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE): UGM.
- Sulaiman, Wahid. (2004). *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tarigan, Robinson. 2006. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pendapatan Perbandingan Antara Empat Hasil Penelitian*. Jurnal Wawasan, Februari 2006, Volume 11, Nomor 3.
- Todaro, Michael P. 1995. Terjemahan Agustinus Subekti dari *Economic Development in The Third World*. Jakarta: Bumi Aksara.